



INTISARI

Pendekatan epidemiologi terhadap masalah gizi buruk bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan erat dengan timbulnya masalah gizi buruk di masyarakat yang dapat dilakukan melalui surveilans gizi dimana informasi yang dihasilkan berguna dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengolahan program dalam rangka perbaikan gizi masyarakat. Dalam praktiknya, surveilans gizi buruk tidak luput dari permasalahan etika yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis dilema etika pelaksanaan surveilans gizi buruk pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sragi I dan Puskesmas Sragi II Kabupaten Pekalongan menggunakan aliran berpikir deontologi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada 15 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 5 orang kelompok tenaga kesehatan dan 10 orang kelompok keluarga balita gizi buruk. Analisis data disajikan dalam deskripsi yang disajikan bersama landasan teoretis sesuai temuan yang muncul dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan surveilans gizi buruk dilakukan oleh tenaga pelaksana gizi dengan latar belakang pendidikan di bidang gizi sesuai dengan profesional etiknya. Pelaksanaan surveilans gizi buruk di Puskesmas Sragi I dan Puskesmas Sragi II sudah terlaksana dengan baik terbukti dari sistem pencatatan dan pelaporan surveilans gizi yang sudah terstruktur. Batasan prinsip etika yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prinsip etika deontologi dan dihasilkan bahwa kegiatan surveilans gizi buruk tetap dilakukan karena tidak memiliki potensi risiko bahaya untuk sasaran dan lebih banyak memberikan manfaat namun dengan catatan tetap mengutamakan otonomi pasien. Tantangan etika juga kerap muncul karena informasi pribadi individu mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya ketika stigma dan diskriminasi tersebut menyertai kondisi individu. Dengan demikian, pelaksanaan praktik surveilans gizi harus mengikuti etika profesional yang ada untuk meminimalkan dampak buruk pada kelompok sasaran.

Kata kunci : surveilans gizi buruk, etika kesehatan masyarakat, profesionalisme



ABSTRACT

The epidemiological approach to malnutrition problems aims to analyze factors related to the emergence of malnutrition problems in society through the implementation of nutritional surveillance where this information is useful for decision making to improving community nutrition. Malnutrition surveillance can't be separated from ethical issues. So, the research is needed to analyze the ethics of implementing malnutrition surveillance at the Puskesmas Sragi I and Puskesmas Sragi II, Pekalongan Regency based on deontological theory.

This is a descriptive research with a qualitative study design. Data collection was carried out through semi-structured interviews with 15 respondents selected by purposive sampling technique. Data analysis presented descriptively with a theoretical basis in accordance with the findings in the research.

This research showed that the implementation of malnutrition surveillance is carried out by nutrition practitioners who have an educational background in the field of nutrition. The implementation of malnutrition surveillance at the Puskesmas Sragi I and Puskesmas Sragi II has been carried out well as evidenced by a structured nutritional surveillance recording and reporting system. The boundaries of the ethical principles use deontological ethical principles so that malnutrition surveillance are still carried out because they don't pose a potential risk of harm to patients and provide more benefits, but patient autonomy is still prioritized. Ethical challenges often arise because personal information affects all aspects of life, especially when stigma and discrimination accompany an individual's condition. Therefore, the implementation of nutritional surveillance practices must follow existing professional ethics to minimize adverse impacts on patients.

Keyword: *malnutrition surveillance, public health ethics, profesionalism*